

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI
KAWASAN LEBAK CINDO, KELURAHAN 24 ILIR
KOTA PALEMBANG**
**(Studi Pasca Dilaksanakan Kegiatan Program Kota Tanpa
Kumuh Oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Melalui Balai Prasarana Permukiman
Wilayah Sumsel)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



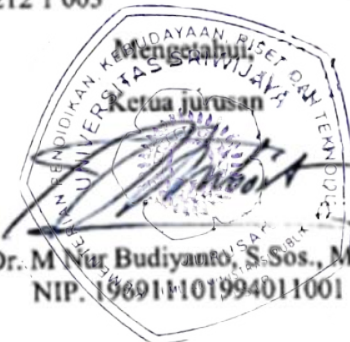
Oleh :

**Tsabitah Salsabila
07011381924230**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Maret 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI
KAWASAN LEBAK CINDO, KELURAHAN 24 ILIR KOTA
PALEMBANG****(Studi Pasca Dilaksanakan Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh
Oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumsel)****SKRIPSI****Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1****Ilmu Administrasi Publik****Oleh :****Tsabitah Salsabila****07011381924230****Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing 10 Maret 2023****Pembimbing I****Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si****NIP. 19780512 200212 1 003**

Mengesahui,
Ketua jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

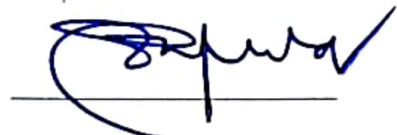
**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI
KAWASAN LEBAK CINDO, KELURAHAN 24 ILIR
KOTA PALEMBANG**
(Studi Pasca Dilaksanakan Kegiatan Program Kota Tanpa
Kumuh Oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat Melalui Balai Prasarana Permukiman
Wilayah Sumsel)

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada Tanggal 21 Maret 2023
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI


Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
Ketua



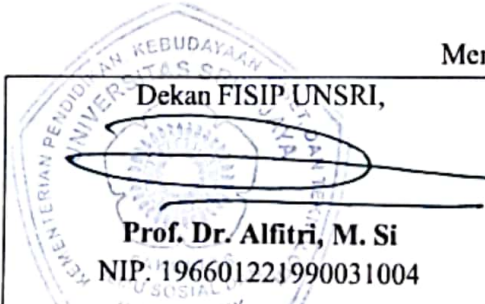

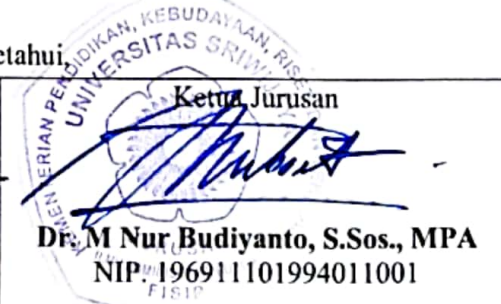

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
Anggota



Aulia Utami Putri, S.I.P., M.Si
Anggota



Mengetahui

 <p>Dekan FISIP UNSRI,  Prof. Dr. Alfitri, M. Si NIP. 196601221990031004</p>	 <p>Ketua Jurusan  Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA NIP. 196911101994011001</p>
--	---

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tsabitah Salsabila

NIM : 07011381924230

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Di Kawasan Lebak Cindo, Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang (Studi Pasca Dilaksanakan Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumsel)” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, 4 April 2023



Tsabitah Salsabila

07011381924230

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

*Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,
sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras
(untuk urusan yang lain),
dan hanya kepada Tuhan mulah engkau berharap.*

- QS. Al-Insyirah ayat 5-8

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya laporan skripsi ini terselesaikan dengan baik.
2. Ayah dan Ibu, terima kasih atas dukungannya selama ini.
3. Semua keluarga besar.
4. Almamater tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Di Kawasan Lebak Cindo, Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang (Studi Pasca Dilaksanakan Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumsel). Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ke zaman terang benderang hingga sampai seperti sekarang ini. Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Selain itu skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para pembaca sebagai pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan pembaca. Namun, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, atas kekurangan tersebut penulis berharap dapat memberikan saran dan kritik yang membangun untuk penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam membantu proses perencanaan hingga penyusunan akhir laporan skripsi ini. Penulis mengucapkan Terima Kasih banyak kepada.

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, lindungan, serta kesehatan dan kemudahan dalam setiap detiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ayah dan ibu sebagai penguat perjuangan penulis untuk bisa membahagiakan mereka di dunia dan akhiratnya. Gelar sarjana ini penulis persembahkan kepada ayah dan ibu serta sebagai bukti bahwa kedua orang tua penulis berhasil dalam mendidik dan menghantarkan penulis ke jenjang perguruan tinggi negeri.
3. Kedua saudara kandung, terima kasih telah memberikan semangat setiap harinya, serta dapat menjadi tempat yang nyaman untuk sharing aktivitas penelitian penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fisip Unsri

5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu penulis dalam setiap menghadapi dan menyelesaikan masalah, serta membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
7. Bapak A. Rahman selaku kepala seksi pemerintah Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dikelurahan wilayah mereka
8. Bapak Chairil, S.H selaku sekretaris Kelurahan 24 Ilir , ibu Eny Triana, S.Sos selaku kepala seksi pembangunan masyarakat Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian disana
9. Bapak Sutikno, bapak Muhammad Harun, bapak Sudarto, bapak Hartoyo, ibu Meltarini, ibu Herika selaku Pihak Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP) Lebak Cindo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian disana, dan memberikan informasi yang tepat dan benar.
10. Ibu Meltarini, ibu Any Baniar, ibu Kartika, ibu Sulastri, ibu Dahlia selaku pihak Kelompok Bank Sampah Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian disana, dan memberikan informasi yang tepat dan benar.
11. Deri Irwansyah yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman sekolah menengah atas (SMA) Indah Permata dan Pawestri Socaningrum, dan Seluruh anggota “Himamj” Sisca Depria, Khansa Lulu, Annisa Nabilah, Ananda Risha, Inayyah Qullamah dan Dhea Nabilah.
13. Teman seperjuangan Jurusan Administrasi Publik Angkatan 2019.
14. Untuk diri penulis, Terima kasih telah mau berjuang dari awal perkuliahan hingga ditahap penulisan tugas akhir dengan baik.

Palembang, 2023

Tsabitah Salsabila

ABSTRAK

ABSTRAK

Masyarakat menjadi peran penting untuk bertugas memelihara dan mengelola kawasan permukiman agar dapat bertahan lama. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Di Kawasan Lebak Cindo, Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini ada 9 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kebijakan pemeliharaan permukiman Lebak Cindo pasca program kotaku dapat dilihat dari indikator cohen dan uphoff (1980). Partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan sudah dikatakan cukup baik karena telah adanya kehadiran masyarakat dalam pembentukan kebijakan. Partisipasi dalam pelaksanaan sudah dikatakan baik untuk Bank Sampah karena telah melakukan kegiatan namun untuk Kpp masing kurang. Partisipasi dalam pengambilan manfaat sudah dikatakan baik untuk Bank Sampah karena dapat mengurangi sampah, untuk Kpp cukup baik atas pengadaan kotak sampah dan pelayanan aspirasi masyarakat. Partisipasi dalam evaluasi sudah dikatakan cukup baik karena telah Kelompok Bank Sampah dan Kpp telah melakukan rapat evaluasi. Adapun faktor penghambat dari masyarakat itu sendiri dan pemerintah. faktor pendukung yaitu adanya dukungan pemerintah dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan permukiman baik secara fasilitas, konsumsi, dan dukungan.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pemeliharaan, Permukiman

Pembimbing I

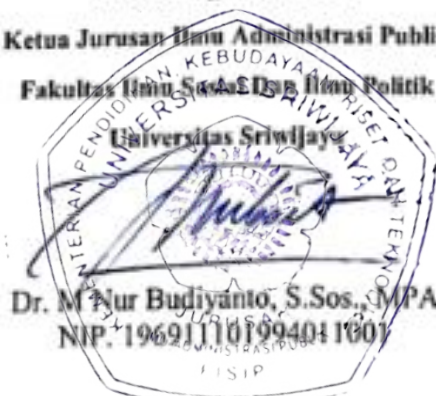
Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 19780512 200212 1 003



Palembang, Maret 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



ABSTRACT

Communities play an important role in maintaining and managing residential areas so that they can last a long time. This study aims to determine community participation in environmental maintenance policies in the Lebak Cindo area, Kelurahan 24 Ilir Palembang City. This type of research is a qualitative research. Data collection techniques by means of interviews, observation and documentation. There were 9 informants in this study. The results of the study show that community participation in the maintenance policy of the Lebak Cindo settlement after the Kotaku program can be seen from the indicators of Cohen and Uphoff (1980). Community participation in decision-making has been said to be quite good because there has been the presence of the community in policy formation. Participation in the implementation has been said to be good for the Waste Bank because it has carried out activities but for each KPP it is lacking. Participation in taking benefits has been said to be good for the Garbage Bank because it can reduce waste, for KPP it is quite good for providing trash boxes and serving community aspirations. Participation in the evaluation has been said to be quite good because the Waste Bank Group and KPP have held evaluation meetings. The inhibiting factors are the community itself and the government. supporting factors, namely the existence of government support in environmental maintenance activities both in terms of facilities, consumption, and support.

Keywords: Community Participation, Maintenance, Settlements

Advisor I

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 19780512 200212 1 003



Palembang, Maret 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.4.1. Manfaat Teoritis	14
1.4.2. Manfaat Praktis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Manajemen.....	16
2.1.1. Konsep Manajemen.....	16
2.1.2 Fungsi Manajemen	17
2.2. Partisipasi	19
2.2.1. Konsep Partisipasi	19
2.2.2. Partisipasi Masyarakat.....	20
2.2.3. Tahapan Partisipasi Masyarakat.....	22
2.2.4. Bentuk Partisipasi Masyarakat	25
2.2.5. Tingkatan Partisipasi Masyarakat	27
2.3. Partisipasi Dalam Pemerintahan	28
2.3.1. Keterkaitan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan	28
2.4. Permukiman	29
2.4.1. Konsep Permukiman	29
2.4.2. Pola Permukiman	33
2.5. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	34
2.5.1. Konsep Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).....	34
2.6. Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian	36
2.7. Penelitian Terdahulu	37

2.8. Kerangka Pemikiran.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1. Jenis Penelitian.....	48
3.2. Definisi Konsep	48
3.3. Fokus Penelitian.....	49
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	52
3.5. Informan Penelitian.....	53
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.7. Teknik Analisis Data.....	56
3.8. Teknik Keabsahan Data	57
3.9. Sistematika Penulisan	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
4.1.1. Gambaran Umum Kota Palembang.....	59
4.1.2. Gambaran Umum Kelurahan 24 Ilir Palembang.....	65
4.2. Program Kota Tanpa Kumuh Di Lebak Cindo, Kelurahan 24 Ilir Palembang	75
4.3. Partisipasi Kelompok Masyarakat Dalam Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Di Lebak Cindo.....	79
4.3.1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan.....	81
4.3.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan	104
4.3.3. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat	151
4.3.4. Partisipasi Dalam Evaluasi.....	167
4.4. Hasil Temuan	192
4.5. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Lebak Cindo Pasca Program Kotaku	197
4.5.1. Faktor Penghambat.....	198
4.5.2. Faktor Pendukung	199
BAB V PENUTUP.....	200
5.1. Kesimpulan	200
5.2. Saran	200
DAFTAR PUSTAKA.....	202
LAMPIRAN.....	204

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Palembang Tahun 2020.....	4
Tabel 1.2 Permasalahan Di Kawasan Lebak Cindo	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 2.2 Kerangka pemikiran.....	47
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	50
Tabel 3. 2 Informan Penelitian.....	53
Tabel 4.1 : Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Palembang.....	62
Tabel 4.2 : Data perkembangan jumlah penduduk di Kelurahan Kelurahan 24 Ilir	69
Tabel 4.3 : Mata pencaharian Kelurahan Dua Puluh Empat Ilir	70
Tabel 4.4 : Data penduduk berdasarkan agama dan keyakinan di Kelurahan 24 Ilir	71
Tabel 4.5 : Tempat Ibadah Kelurahan 24 Ilir	72
Tabel 4.6 : Tempat – Tempat Pendidikan di Kelurahan 24 Ilir	72
Tabel 4.7 : Prasarana Kesehatan Kelurahan 24 Ilir	73
Tabel 4.8 : Prasarana Olahraga Kelurahan 24 Ilir	73
Tabel 4.9 : Profil kawasan Lebak Cindo.....	74
Tabel 4.10 : Hasil perbaikan dan penataan Lebak Cindo.....	77
Tabel 4.11 : Kepengurusan Bank Sampah Rumas Limas Di Lebak Cindo	97
Tabel 4.12 : Kepengurusan Kpp Kelurahan 24 Ilir Palembang	99
Tabel 4. 13 : Matriks Aspek Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan.....	102
Tabel 4. 14 Rencana Kerja Kpp Lebak Cindo Tabel	134
Tabel 4.15 Rencana Kpp Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	136
Tabel 4. 16 Rencana Anggaran Kpp	143
Tabel 4. 17 : Matriks Aspek Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan	147
Tabel 4. 18 : Potensi Industri Rumah Tangga Kawasan Lebak Cindo Tabel.....	155
Tabel 4. 19 : Matriks Aspek Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat Tabel	164
Tabel 4. 20 Identifikasi Kerusakan Di Lebak Cindo.....	172

Tabel 4. 21 : Target Kegiatan Kpp Lebak Cindo	176
Tabel 4. 22 : Matriks Aspek Partisipasi Dalam Evaluasi Tabel.....	189
Tabel 4. 23 : Hasil Penemuan Penelitian	193

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Wilayah Kota Palembang.....	61
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang	68
Gambar 4.3 : Wilayah Kelurahan Dua Puluh Empat Ilir	69
Gambar 4.4 : Lokasi Lebak Cindo di Kelurahan 24 Ilir	74
Gambar 4.5 Before After Lebak Cindo Setelah Program Kotaku	77
Gambar 4. 6 : Pembukaan Sosialisasi Pilot Project Oleh Kepala Camat Bukit Kecil.....	84
Gambar 4. 7 : Kehadiran Masyarakat Dalam Rapat Pembentukan Bank Sampah.....	88
Gambar 4. 8 : Partisipasi Masyarakat Dalam Rapat Pembentukan Kpp.....	90
Gambar 4. 9 : Masyarakat Berdiskusi Bersama Kepala Kasi Pm Kelurahan 24 Ilir	92
Gambar 4. 10 : Diskusi Masyarakat Dalam Rapat Pembentukan Kpp	93
Gambar 4. 11 : Rapat Sk Kpp Bersama Masyarakat.....	101
Gambar 4. 12 : Gotong Royong Masyarakat Lebak Cindo.....	108
Gambar 4.13 : Partisipasi Kelompok Bank Sampah Dalam Gotong Royong.....	108
Gambar 4. 14 : Partisipasi Kelompok Bank Sampah Rumah Limas Pada Pelatihan.....	112
Gambar 4. 15 : Jemput Bola Oleh Bank Sampah.....	114
Gambar 4. 16 : Sosialisasi Bank Sampah Ke lembaga pendidikan serta pengusaha.....	116
Gambar 4. 17 : Pelatihan Kpp Oleh Bppw Sumsel.....	118
Gambar 4. 18 : Kpp Mengikuti Pelatihan	119
Gambar 4. 19 : Keahlian Masyarakat Pada Saat Gotong Royong	122
Gambar 4. 20 : Kegiatan Pemilahan Dan Penimbangan Bank Sampah Rumah Limas.....	124
Gambar 4. 21 : Ketua Kpp Memberikan Usulan Di Rapat Musrenbang	131
Gambar 4. 22 : Usulan Warga Rt Lebak Cindo Dalam Musrenbang.....	131
Gambar 4. 23 : Rapat Rencana Program Kerja Oleh Kpp	136
Gambar 4. 24 : Buku Pencatatan Dan Tabungan Nasabah Bank Sampah.....	141

Gambar 4. 25 : Kelompok Bank Sampah Mengikuti Pameran Sampah Daur Ulang.....	153
Gambar 4. 26 : Fasilitas Kelompok Bank Sampah Rumah Limas Sumber : Dokumentasi Kelompok Bank Sampah Rumah Limas.....	159
Gambar 4. 27 : Rapat Evaluasi Anggota Bank Sampah.....	180
Gambar 4. 28: Rapat Evaluasi Kelompok Bank Sampah Rumah Limas.....	181
Gambar 4. 29 : Rapat Evaluasi Rencana Program Kerja Kpp	183

DAFTAR SINGKATAN

KOTAKU	: Kota Tanpa Kumuh
KPP	: Kelompok Pemanfaatan Dan Pemeliharaan
BSI	: Bank Sampah Induk

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian.....	204
Lampiran 2 : Surat Keputusan Pembentukan Bank Sampah Rumah Limas.....	206
Lampiran 3: Surat Keputusan Pembentukan KPP	207
Lampiran 4 : Permen Kementerian PUPR No. 12 tahun 2020	208
Lampiran 5 : UU RI No 1 Tahun 2011	209
Lampiran 6 : Perwako Palembang No 14 Tahun 2019	210
Lampiran 7 : Perwako Palembang No 3 Tahun 2020	211
Lampiran 8: Lembar Perbaikan Ujian Kompre.....	212
Lampiran 9: Surat Keterangan Pengecekan Similarity	213
Lampiran 10 : Hasil Similarity.....	214
Lampiran 11 : Surat Izin Kesbangpol	214
Lampiran 12 : Surat Izin Penelitian Di Kelurahan 24 Ilir Palembang	215
Lampiran 13 : Surat Izin Penelitian Kecamatan Bukit Kecil Palembang	216
Lampiran 14 : Kartu Bimbingan Skripsi.....	217
Lampiran 15: Sk Pembimbing Skripsi	219
Lampiran 16 : Surat Tugas	220
Lampiran 17 : Lembar Perbaikan Sempro	220
Lampiran 18 : Kartu Bimbingan Sempro.....	221
Lampiran 19 : Surat Balasan Izin Penelitian.....	223
Lampiran 20 : Pedoman Observasi	223
Lampiran 21: Pedoman Dokumentasi.....	224
Lampiran 22: Pedoman Wawancara	226

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau *The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau *SDGs*) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan menuju pembangunan berkelanjutan dengan berdasarkan hak asasi manusia serta kesetaraan demi mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Sustainable Development Goals (SDGs) disepakati masyarakat dunia pada bulan September 2015, terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan *pencapaian Millennium Development Goals (MDGs)* yang telah berakhir pada tahun 2015. *SDGs/TPB* dilaksanakan dengan prinsip universal dan menyeluruh sehingga tidak ada yang terlewatkan atau 'tidak ada yang tertinggal' atau “*No-One Left Behind*”. Presiden RI telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sebagai bentuk komitmen dan keseriusan bangsa Indonesia dalam mewujudkan *TPB/SDGs*.

Permasalahan perkotaan di Indonesia dan permasalahan di negara berkembang pada umumnya jauh lebih rumit dibandingkan dengan permasalahan di negara industri, salah satunya termasuk daerah kumuh. Keberadaan permukiman kumuh sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang terjadi lebih cepat dari pertumbuhan infrastruktur. Alhasil, warga perkotaan mencari nafkah sendiri, lalu membangun rumah dengan fasilitas seadanya. Kehadiran permukiman kumuh tentu membebani kota-kota yang terlibat. Hal ini menyebabkan berkurangnya

kualitas lingkungan, meningkatnya risiko kerawanan dan konflik sosial, merendahnya tingkat kesehatan masyarakat dan kualitas sarana/prasarana pelayanan.

Permukiman kumuh harus segera dibenahi, atau paling tidak permukiman kumuh harus dihentikan, dan kawasan kumuh yang ada juga harus mulai disulap menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni, sehat, aman, serasi, dan tertata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menjelaskan bahwa keberpihakan negara terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, dalam hal ini Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menyediakan kemudahan konstruksi dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan. secara bertahap dan terus menerus. Kemudahan membangun dan memperoleh rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pemberian pinjaman dan pembiayaan, pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, keringanan biaya perizinan, bantuan stimulan dan insentif fiskal.

Pentingnya mengatasi masalah permukiman kumuh ini sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. yang menjelaskan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui peningkatan kualitas permukiman kumuh dan pencegahan berkembangnya permukiman kumuh baru serta penghidupan yang berkelanjutan.

Kementerian PUPR sebagai lembaga pemerintah berkomitmen untuk memberantas permukiman kumuh dengan tepat sasaran. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mewujudkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Surat

Edaran Ditjen Cipta Karya Nomor : 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) membentuk program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sebagai “tahap” kerjasama dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh dimana pemerintah daerah dapat mengarahkan pelaksanaannya kegiatan melalui fasilitator di setiap kelurahan dan mendorong partisipasi masyarakat.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100% akses *universal* air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak (Kotaku.pu.go.id, 2017). Tujuan umum dari program ini adalah untuk meningkatkan akses infrastruktur dan fasilitas pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Kota Palembang yang dikenal dengan julukan Venesia dari timur merupakan ibu kota Sumatera Selatan yang menempati kota terbesar kedua setelah Medan untuk kategori di wilayah Sumatera. Kota Palembang dikenal sebagai kota industri dan perdagangan yang artinya menjadi pusat produktivitas masyarakat sekitar. Tentunya hal ini akan memberikan dampak baik sekaligus dampak buruk terhadap kondisi lingkungan di Kota Palembang. Kota Palembang merupakan salah satu kota yang memiliki kawasan kumuh di Indonesia. Munculnya permukiman kumuh disebabkan oleh kemiskinan dan pada awal pembangunan perumahan tidak dibersamai dengan fasilitas pendukung, seperti jalan, akses alat pemadam kebakaran, drainase dan lain-lain.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Palembang No 325/Kpts/Dprkp/2020 Tentang Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Palembang.

Tabel 1.1 Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Palembang Tahun 2020

No	Lokasi	Luas (HA)	Kelurahan	Kecamatan	Kekumuhan
1	23 Ilir	2,950	23 Ilir	Bukit Kecil	Kumuh Ringan
2	24 Ilir	11,500	24 Ilir	Bukit Kecil	Kumuh Ringan
3	26 Ilir	3,740	26 Ilir	Bukit Kecil	Kumuh Ringan
4	36 Ilir	13,494	26 Ilir	Gandus	Kumuh Ringan
5	Gandus	7,795	Gandus	Gandus	Kumuh Ringan
6	Karang Anyar	21,290	Karang Anyar	Gandus	Kumuh Ringan
7	Karang Jaya	4,382	Karang Jaya	Gandus	Kumuh Ringan
8	Pulo Kerto	64,847	Pulo Kerto	Gandus	Kumuh Ringan
9	27 Ilir	1,450	27 Ilir	Ilir Barat II	Kumuh Ringan
10	28 Ilir	5,731	28 Ilir	Ilir Barat II	Kumuh Ringan
11	29 Ilir	13,900	29 Ilir	Ilir Barat II	Kumuh Ringan
12	30 Ilir	10,236	30 Ilir	Ilir Barat II	Kumuh Ringan
13	32 Ilir	11,953	32 Ilir	Ilir Barat II	Kumuh Ringan
14	35 Ilir	11,020	35 Ilir	Ilir Barat II	Kumuh Ringan
15	13 Ilir	0,500	13 Ilir	Ilir Barat I	Kumuh Ringan
16	14 Ilir	1,870	14 Ilir	Ilir Barat I	Kumuh Ringan
17	15 Ilir	4,00	15 Ilir	Ilir Barat I	Kumuh Ringan
18	1 Ilir	1,258	1 Ilir	Ilir Timur II	Kumuh Ringan
19	2 Ilir	14,378	2 Ilir	Ilir Timur II	Kumuh Ringan
20	Lawang Kidul	19,928	Lawang Kidul	Ilir Timur II	Kumuh Ringan
21	10 Ilir	1,884	10 Ilir	Ilir Timur Tiga	Kumuh Ringan

No	Lokasi	Luas (HA)	Kelurahan	Kecamatan	Kekumuhan
22	11 Ilir	0,284	11 Ilir	Ilir Timur Tiga	Kumuh Ringan
23	Kuto Batu	4,694	Kuto Batu	Ilir Timur Tiga	Kumuh Ringan
24	15 Ulu	30,050	15 Ulu	Jakabaring	Kumuh Ringan
25	8 Ulu	22,630	8 Ulu	Jakabaring	Kumuh Ringan
26	9/10 Ulu	32,997	9/10 Ulu	Jakabaring	Kumuh Ringan
27	Silaberanti	2,770	Silaberanti	Jakabaring	Kumuh Ringan
28	Tuan Kentang	6,200	Tuan Kentang	Jakabaring	Kumuh Ringan
29	Sei Selayur	4,475	Sei Selayur	Kalidoni	Kumuh Ringan
30	Karya Jaya	150,890	Karya Jaya	Kertapati	Kumuh Ringan
31	Kemang Agung	89,800	Kemang Agung	Kertapati	Kumuh Ringan
32	Kemas Rindo	24,760	Kemas Rindo	Kertapati	Kumuh Ringan
33	Keramasan	77,250	Keramasan	Kertapati	Kumuh Ringan
34	Kertapati	32,689	Kertapati	Kertapati	Kumuh Ringan
35	Ogan Baru	43,150	Ogan Baru	Kertapati	Kumuh Ringan
36	Bagus Kuning	13,074	Bagus Kuning	Plaju	Kumuh Ringan
37	Plaju Darat	56,074	Plaju Darat	Plaju	Kumuh Ringan
38	Plaju Ilir	10,210	Plaju Ilir	Plaju	Kumuh Ringan
39	Plaju Ulu	7,000	Plaju Ulu	Plaju	Kumuh Ringan
40	Talang Bubuk	1,830	Talang Bubuk	Plaju	Kumuh Ringan
41	Talang Putri	4,710	Talang Putri	Plaju	Kumuh Ringan
42	1 Ulu	3,910	1 Ulu	Seberang Ulu I	Kumuh Ringan
43	2 Ulu	17,090	2 Ulu	Seberang Ulu I	Kumuh Ringan

No	Lokasi	Luas (HA)	Kelurahan	Kecamatan	Kekumuhan
44	3-4 Ulu	16,240	3-4 Ulu	Seberang Ulu I	Kumuh Ringan
45	5 Ulu	21,830	5 Ulu	Seberang Ulu I	Kumuh Ringan
46	7 Ulu	30,610	7 Ulu	Seberang Ulu I	Kumuh Ringan
47	11 Ulu	10,314	11 Ulu	Seberang Ulu II	Kumuh Ringan
48	12 Ulu	7,380	12 Ulu	Seberang Ulu II	Kumuh Ringan
49	13 Ulu	40,370	13 Ulu	Seberang Ulu II	Kumuh Ringan
50	14 Ulu	48,700	14 Ulu	Seberang Ulu II	Kumuh Ringan
51	16 Ulu	21,893	16 Ulu	Seberang Ulu II	Kumuh Ringan
52	Sentosa	7,200	Sentosa	Seberang Ulu II	Kumuh Ringan
53	Tangga Tangkat	23, 132	Tangga Tangkat	Seberang Ulu II	Kumuh Ringan

Sumber : SK Walikota No 325 Tahun 2020

Dari lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kota Palembang yang telah ditetapkan diatas, dipilih salah satu kawasan prioritas atau perlu mendapat penanganan segera, salah satu kelurahan yang mendapatkan fasilitas program kotaku adalah Kelurahan 24 Ilir , Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang. Program kota tanpa kumuh di Kelurahan 24 Ilir dilaksanakan dengan perbaikan kawasan Lebak Cindo. Kawasan Lebak Cindo terkenal memiliki permasalahan kekumuhan. Permasalahan utama kondisi kekumuhan di kawasan Lebak Cindo Kelurahan 24 Ilir yaitu :

Tabel 1.2 Permasalahan Di Kawasan Lebak Cindo

No	Permasalahan di Kawasan Lebak Cindo
1	Permukiman di sepanjang bantaran sungai sekanak pada kelurahan

No	Permasalahan di Kawasan Lebak Cindo
	dua puluh empat ilir merupakan dataran rendah, yang terdiri dalam kawasan Lebak Cindo 6 RT yaitu : RT 15, RT 16, RT 17, RT 20, RT 21 dan RT 22
2	Bangunan yang berada di Lebak Cindo tersebut padat, serta ketidakteraturan letak bangunan.
3	Ketidak sesuaian peruntukan lahan di bantaran sungai
4	Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat
5	Sanitasi resiko tinggi
6	Bantaran sungai masih berstatus lahan ilegal
7	Tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
8	Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi perumahan yang sah, sehat, dan layak huni sehingga mereka tinggal di atas tanah negara
9	Sarana dan prasarana persampahan tidak memadai

Sumber: diolah penulis

Dilihat diatas banyak permasalahan kekumuhan yang ada di kawasan Lebak Cindo Kelurahan 24 Ilir . Padahal lokasi ini sangat berpengaruh terhadap pusat pelayanan kota & merupakan lokasi strategis kota karena potensi pengembangan wisata di kawasan tersebut sangatlah besar, maka dari itu Pemerintah Kota Palembang dalam penataan kawasan kumuh menyusun rencana aksi penanganan kumuh yang dituangkan dalam dokumen memorandum Program Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)

Kota Palembang diantaranya rencana penataan kawasan prioritas yaitu Kawasan 5 (Sub Kawasan Sekanak) yang terletak di sepanjang bantaran sungai Sekanak. Pelaksanaan program kotaku di kawasan Lebak Cindo Kelurahan 24 Ilir dilakukan pada tahun 2020 dan selesai pada bulan September tahun 2021.

Dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan di Indonesia diharapkan dapat berkelanjutan, meski dalam kenyataannya pembangunan perkotaan di Indonesia tak jarang masih lalai dalam memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemeliharaan lingkungan permukiman pasca program kotaku memerlukan partisipasi masyarakat hal ini bertujuan untuk tetap menjaga kualitas permukiman agar tidak kembali nya kawasan kumuh baru serta menjamin keberlanjutan. Pembangunan berkelanjutan di sektor permukiman didefinisikan sebagai pembangunan perkotaan, sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kondisi kualitas sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai tempat tinggal dan pekerjaan setiap orang. Pembangunan permukiman dan perumahan yang memanfaatkan ruang terbesar di suatu tempat, baik di perkotaan maupun pedesaan, merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Oleh karena itu pengelolaan pembangunan perumahan harus senantiasa memperhatikan ketersediaan dukungan sumber daya yang memadai, baik primer maupun sekunder, yang diperlukan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 2017 Tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan/atau pemeliharaannya, serta Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau

Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penanganan permukiman kumuh dalam program kotaku tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Lingkup pekerjaan pengelolaan permukiman kumuh program Kotaku berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibagi menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu:

1. Pencegahan

Upaya pencegahan permukiman kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan baru dan permukiman kumuh. Upaya preventif meliputi pemantauan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat.

2. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilakukan melalui pola perawatan, antara lain restorasi, peremajaan dan pemukiman kembali.

3. Pengelolaan

- a. Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- b. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- c. Pengelolaan oleh masyarakat difasilitasi oleh pemerintah daerah baik dukungan pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan.
- d. Pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan berbagai sumber pendanaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman , pasal 12 ayat 2 menjelaskan bahwa Peran Masyarakat dalam pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) dilakukan dengan memberi masukan terhadap:

- a. Proses pemeliharaan dan perbaikan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan/atau lingkungan;
- b. Identifikasi kebutuhan pemeliharaan atau perbaikan pada bangunan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- c. Identifikasi kebutuhan pemeliharaan atau perbaikan pada bangunan fasilitas jasa pemerintahan, pelayanan sosial, atau kegiatan ekonomi; dan/atau
- e. Penyusunan strategi pendampingan Masyarakat terdampak.

Sejak tahun 2021 kawasan Lebak Cindo telah merasakan manfaat dari adanya kotaku. Pembangunan yang dilakukan oleh balai prasarana permukiman wilayah sumatera melalui program kotaku membangun infrastruktur untuk meningkatkan kualitas lingkungan kumuh yang berada di Kelurahan 24 Ilir , Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang. Namun perubahan lebih baik ini hanya bertahan kurang lebih satu tahun, dikarenakan pengelolaan yang kurang dalam menjaga dan memelihara kawasan Lebak Cindo ini membuat kawasan ini mengalami kerusakan fasilitas dan lingkungan. pemeliharaan lingkungan permukiman merupakan suatu hal penting dalam pembangunan pasca program kota tanpa kumuh. Pemilihan lokasi Lebak Cindo untuk pemeliharaan permukiman dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan yang masuk dalam Palembang 360 wisata *virtual* yang merupakan website Dinas Pariwisata dalam meningkatkan wisatawan Palembang, sehingga Lebak Cindo

dibutuhkan pemeliharaan agar tidak menimbulkan perbedaan yang jauh antara ekspektasi dan realita.

Masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih menjadi hal penting dalam terciptanya kondisi kawasan permukiman yang baik, sehat dan bersih. Namun kenyataan yang ditemukan bahwa masyarakat di sekitar kawasan Lebak Cindo masih membuang sampah ke sungai bahkan di jalan serta fasilitas tempat duduk umum. Sampah telah menjadi permasalahan di setiap kota besar. Masalah persampahan ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan (Susanti, 2017). Keberadaan tumpukan sampah tersebut dapat sangat mengganggu masyarakat sekitar, masalah yang sering timbul dari sampah tidak lain adalah bau busuk, banyak lalat, gangguan sistem drainase sampai tercemarnya kualitas air. Selain itu jalan di pinggiran sungai di Lebak Cindo mengalami kerusakan yang cukup parah, terlihat jalan yang ada sudah mengalami keretakan sehingga permukaan jalan tidak merata. Selanjutnya terlihat dari tugu “Lebak Cindo” yang mengalami kerusakan, padahal bangunan ini baru satu tahun diperbaiki, serta trotoar jalan sepanjang sungai sekanak tersebut sering dilalui motor sehingga cat jalan dan *stamp concrete* semakin memudar. Tanaman yang tidak terawat dengan baik, serta bangunan dinding tugu yang rubuh, bangunan kursi yang rusak dan besi pembatas sungai yang hilang, serta lampu taman dan jalan yang pecah.

Masyarakat begitu antusias ketika merencanakan dan melaksanakan serta menerima program kotaku, namun setelah selesai kegiatan dan dimanfaatkan, pemerintah dan masyarakat tidak memelihara atau merawatnya. Kegiatan yang dibiayai oleh program kotaku tidak dapat bertahan lama dan cenderung dibiarkan. Faktor keadaan masyarakat yang sangat rendah berdampak pada ketidaktahuan

mereka bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup. Jika masyarakat tidak bergerak dan tidak terlibat aktif, maka program tidak akan berjalan. Bahkan kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh. Maka dari itu masyarakat menjadi peran penting untuk bertugas memelihara dan mengelola kawasan tersebut agar dapat bertahan lama. masyarakat dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan khususnya dalam pengelolaan kawasan permukiman, Serta pihak pemerintah memberikan fasilitas serta ruang untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pengelolaan permukiman berkelanjutan.

Pemerintah menjadi koordinator dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat, karena program kotaku mendukung pemerintah daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni diantaranya memberikan pengetahuan serta pendekatan kepada masyarakat setempat agar dapat menjaga lingkungan permukiman yang telah ditata dan diperbaiki, sehingga terjalin kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sebagai salah satu dalam aktor pembangunan, sangat jelas berperan di dalam mekanisme terjadinya perubahan pada kualitas lingkungan permukiman, baik dalam aktivitas ataupun kegiatan sehari-hari, mereka secara sadar atau tidak sadar akan terus menerus melakukan langkah-langkah terhadap lingkungan, baik dalam memutuskan untuk menentukan tempat tinggal, bekerja, belajar, melakukan perjalanan dan kegiatan lain untuk memenuhi kebutuhan.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat terhadap lingkungan, baik yang direncanakan maupun tidak, akan membawa dampak pada perubahan kualitas lingkungan. Dampak dari perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada karakteristik lingkungan itu saja, melainkan juga berperan terhadap kesehatan dan kesejahteraan

masyarakat yang ada dilingkungan permukiman. Penerapan kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat merupakan terobosan penting untuk meminimalisir terjadinya praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tidak bertanggung jawab

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Di Kawasan Lebak Cindo, Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang (Studi Pasca Dilaksanakan Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumsel)”. Penulis ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan permukiman berkelanjutan di Lebak Cindo yang sudah dibangun dalam program kotaku agar permukiman tersebut dapat terpelihara dengan baik, bukan hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk masa yang akan datang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumusan masalah pada penelitian ini dalam bentuk research question adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Di Kawasan Lebak Cindo, Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang (Studi Pasca Dilaksanakan Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumsel) ?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Di Kawasan Lebak Cindo, Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang (Studi Pasca Dilaksanakan Kegiatan

Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumsel) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Di Kawasan Lebak Cindo, Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang (Studi Pasca Dilaksanakan Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumsel).

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Di Kawasan Lebak Cindo, Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang (Studi Pasca Dilaksanakan Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh Oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumsel).

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi ataupun bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah dalam kebijakan pemeliharaan

lingkungan permukiman pasca dilaksanakan nya Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kawasan Lebak Cindo, Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan walikota Palembang no 325 tahun 2020. Dalam <https://jdih.Palembang.go.id/?nmodul=dokumen&filedok=7326> .
- Kotaku.pu.go.id. dalam <https://kotaku.pu.go.id/>
- Afwah, U. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Skripsi. Uin Walisongo Semarang. Dalam <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9389/1/skripsi%20full.pdf>
- Mahasiswa, Dosen (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Kegiatan Pariwisata Di Desa Wisata Bejiharjo, Gunungkidul, Yogyakarta. *Jurnal Teknik PWK*, 3(4). Dalam <file:///C:/Users/user/Downloads/7025-13710-1-PB.pdf>
- Merry, A. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang(Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). *Jurnal Unesa*. Dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/230717909.pdf>
- Dian, M.A. (2015). Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan. Skripsi. Institut Teknologi Nasional Malang. Dalam <http://eprints.itn.ac.id/2387/1/dkripsi%20diana.pdf>
- Hafidzita, E.P.I. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa*, 5(1). <https://bit.ly/3CuZe7k>
- Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah(Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(1), 73–84. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/447>
- Agustin, M. and Rahaju, T. (no date) Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan).
- Birokrasi, J. *et al.* (2021) ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan’.

Jurnal Kesehatan Masyarakat, P. and Hardianti, S. (no date) ‘Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar’.

Lailatur, O.: *et al.* (no date) *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Sarasah Murai Nagari Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.*

Trishuta Pathiassana, M. and Trishuta Pathiussina, R. (2021) *Social Humaniora* Partisipasi Masyarakat Dalam Keberlanjutan Pengelolaan Bank Sampah Di Desa Semamung. Available at: <http://jurnal.uts.ac.id>.

(Suryani, 2014) Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah(Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(1), 73–84.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/447>

<http://repository.unpas.ac.id/34258/1/J.%20BAB%20II.pdf>